



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DENGAR PENDAPAT PUBLIK DRAF EKSPOSUR AMENDEMEMEN PSAK 1, ISAK 35 DAN PPSAK 13

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



AMENDEMENT PSAK 1

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TENTANG JUDUL LAPORAN KEUANGAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 05

Istilah *Not-for-Profit-Activities*

PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* menggunakan istilah “aktivitas nirlaba” untuk menerjemahkan *not-for-profit activities*. **DE Amendemen ini mengusulkan untuk mengganti kata “aktivitas nirlaba” menjadi “aktivitas nonlaba”.**

DSAK IAI melihat bahwa penggunaan kata “*not*” dalam *not-for-profit activities* tidak semata-mata menunjukkan bentuk negatif atau lawan dari *profit activities*, sehingga penggunaan imbuhan nir (yang berarti tidak atau bukan) dinilai kurang tepat.

Oleh karena itu, DE Amendemen ini mengusulkan untuk menggunakan istilah “aktivitas nonlaba”. Aktivitas nonlaba secara makna dinilai lebih tepat yang berarti aktivitas utamanya tidak berorientasi untuk mencari laba (bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba)).

Apakah anda setuju dengan istilah “aktivitas nonlaba” untuk menerjemahkan *not-for-profit activities*? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 10 & PI01

Opsi Penggunaan Judul Laporan Keuangan

PSAK 1 (EFEKTIF 1 JANUARI 2018)

Tidak Diatur
karena tidak diadopsi

DE AMENDEMENT PSAK 1

Memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan judul 'laporan penghasilan komprehensif', daripada 'laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain'.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan yang diusulkan untuk memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Ketentuan Transisi

DE Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tidak mengatur mengenai ketentuan transisi. Hal ini mensyaratkan bahwa DE Amendemen PSAK 1 menerapkan ketentuan umum dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi.

Jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi akibat disyaratkan oleh SAK dan SAK tersebut tidak mengatur suatu ketentuan transisi, maka perubahan kebijakan akuntansi **diterapkan secara retrospektif**.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 1? *Jika tidak, apa alasan Anda?*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tanggal Efektif

DE Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* diusulkan untuk berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2020**. **DE Amendemen PSAK 1 tidak mengizinkan penerapan dini.**

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 1 ? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA

AMENDEMEN ISAK 35



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Latar Belakang

Pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar (*tier*) yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba.

PSAK 1 (Ruang Lingkup Paragraf 05)

PSAK 1 paragraf 05 menyatakan bahwa “Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik.

Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.”

PSAK 45 (Ruang Lingkup par.01)

Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik nirlaba

Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. Namun demikian, PSAK 1 tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tujuan DE ISAK 35

DE ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI sebagai interpretasi dari PSAK 1 paragraf 05 memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik:

- a. penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan; dan
- b. penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Judul DE ISAK 35

DE ISAK 35 menggunakan judul ***Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba***.

Penggunaan istilah “nonlaba” dalam DE ISAK 35 sejalan dengan istilah “nonlaba” (“*not-for-profit*”) yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*.

Apakah Anda setuju dengan judul DE ISAK 35 “*Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*”?
Jika tidak, apa alasan Anda?



Ruang Lingkup (Paragraf 05-07)

↪ Entitas berorientasi nonlaba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut

≈ Diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

∞ Interpretasi ini diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan

Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan dalam DE ISAK 35? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Interpretasi (Paragraf 09-12)

Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik:

PENYESUAIAN DESKRIPSI YANG DIGUNAKAN UNTUK BEBERAPA POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh entitas berorientasi nonlaba mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan (*with restrictions*) atau tidak adanya pembatasan (*without restrictions*) oleh pemberi sumber daya; dan

PENYESUAIAN DESKRIPSI YANG DIGUNAKAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN ITU SENDIRI

Contoh penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri adalah penyesuaian atas judul laporan keuangan, yaitu penggunaan judul 'laporan perubahan aset neto' daripada 'laporan perubahan ekuitas' untuk entitas nonlaba. Interpretasi ini tidak membatasi penggunaan judul tertentu atas laporan keuangan sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.

Apakah Anda setuju dengan interpretasi yang diusulkan dalam DE ISAK 35? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Ketentuan Transisi

DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* tidak mengatur mengenai ketentuan transisi. Hal ini mensyaratkan bahwa DE ISAK 35 menerapkan ketentuan umum dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi akibat disyaratkan oleh SAK dan SAK tersebut tidak mengatur suatu ketentuan transisi, maka perubahan kebijakan akuntansi **diterapkan secara retrospektif**.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi yang diusulkan dalam DE ISAK 35?
Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tanggal Efektif (Paragraf 13)

DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* diusulkan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2020**.

DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* tidak mengizinkan penerapan dini.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif yang diusulkan dalam DE ISAK 35? *Jika tidak, apa alasan Anda?*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Dasar Kesimpulan & Contoh Ilustratif

Dasar kesimpulan dan contoh ilustratif melengkapi DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* namun bukan merupakan bagian dari DE ISAK 35. Beberapa poin dalam Contoh Ilustratif:

- DE ini memberikan contoh sederhana penyajian laporan keuangan yang **mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.**
- Contoh ilustratif ini **menggunakan istilah “penghasilan komprehensif”** untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menggunakan judul lain sepanjang penggunaan judul lain mampu mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.
- Entitas **menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya** (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

Apakah Anda setuju dengan dasar kesimpulan dan contoh ilustratif yang diusulkan dalam DE ISAK 35? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Contoh Laporan Posisi Keuangan

Terdapat 2 (dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ini. Setiap format memiliki keunggulan.

- Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya; atau
- Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	xxxx	xxxx
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	xxxx	xxxx
ASET NETO		
Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya	xxxx	xxxx
Surplus akumulasi	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain ^{*)}	xxxx	xxxx
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	xxxx	xxxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxxx	xxxx

A

*) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

A Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format B)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	xxxx	xxxx
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	xxxx	xxxx
ASET NETO		
Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya ^{**)}	xxxx	xxxx
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	xxxx	xxxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxxx	xxxx

B

**) mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

B Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif

Ada 2 (dua) format Laporan Penghasilan Komprehensif yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ini. Setiap format memiliki keunggulan:

- Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif; atau
- Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

ENTITAS XYZ
Laporan Perubahan Aset Neto
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2
(dalam jutaan rupiah)

	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
<i>Surplus tahun berjalan</i>	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

↓

(B)

↓

(A)

***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A). (A)

Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B). (B)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PPSAK 13

PENCABUTAN PSAK 45: PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA



Dasar Pertimbangan Pencabutan (Paragraf 03)

- Pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang mengakibatkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain.
- PSAK 45 mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. Pencabutan PSAK 45 seiring dengan penerbitan **DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*** yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba.

Apakah Anda setuju dengan dasar pertimbangan pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Ketentuan Transisi (Paragraf 07)

- DE PPSAK 13 tidak mengatur mengenai ketentuan transisi. Hal ini mensyaratkan bahwa pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* menerapkan ketentuan umum dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi.
- Jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi akibat disyaratkan oleh SAK dan SAK tersebut tidak mengatur suatu ketentuan transisi, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Hal ini sejalan dengan ketentuan transisi dalam DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas berorientasi Nonlaba* yang **diterapkan secara retrospektif**.

Sehubungan dengan rencana pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, apakah Anda setuju pencabutan PSAK 45 tersebut diterapkan secara retrospektif? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tanggal Efektif (Paragraf 08 – 09)

Pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* yang diatur dalam DE PPSAK 13 memerlukan persiapan dan antisipasi bagi entitas yang dulu menerapkannya. Hal ini memerlukan waktu yang cukup. Pencabutan PSAK 45 direncanakan akan efektif mulai **1 Januari 2020**.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TERIMA KASIH



Tanggapan tertulis atas draf eksposur amendemen PSAK 1, ISAK 35, PPSAK 13 paling lambat diterima pada tanggal **31 Desember 2018**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076
E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id